



DOI 10.22437/jiseb.v22i1.8620

**ANALISIS DAYA SAING USAHATANI KELAPA SAWIT RAKYAT DI  
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO**

Analysis of Small-Scale Palm Oil Farming Competitiveness In the Pelepat District of  
Bungo Regency

Sopiyan Adhe Poetera Manik <sup>1)</sup>, Saad Murdy <sup>1)</sup>, Ardhiyan Saputra <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Jambi, Jambi, Indonesia.

e-mail : sopiyan.manik@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research is intended to analyze (1) competitiveness (competitive advantage and comparative advantage), (2) the impact of government policies on output and input, and (3) competitiveness sensitivity in smallholder palm oil farming in District of Pelepat, Bungo Regency. The analytical methods used in this research were Net Present Value and Policy Analysis Matrix. The research was held on February 21st 2016 until March 30th 2016. The results showed that: (1) Smallholder palm oil farming in District of Pelepat, Bungo Regency had competitive advantage with the value of  $PP > 0$  and  $PCR = 0.19$ , also had comparative advantage with the value of  $SP > 0$  and  $DRCR = 0.13$ ; (2) Government policies were unprotective and disincentive to output because the value of  $NPCO$  is 0.67, government policies on tradable input were protective because the value of  $NPCI$  is 0.71, and government policies were overall disincentive to palm oil commodity because the value of  $PC = 0.61$ ,  $EPC = 0.66$ , and  $SRP -0.31$ ; and (3) Smallholder palm oil farming still had competitiveness if the price of output fell down by 50 percent because the value of  $PCR = 0.43$  and  $DRCR = 0.29$ , if the price of input risen up by 6.38 percent because the value of  $PCR = 0.21$  and  $DRCR = 0.14$ , and even if both simulations were happened at the same time, because the value of  $PCR = 0.46$  and  $DRCR = 0.30$ .*

*Keywords: palm oil, competitiveness, competitive advantage, comparative advantage, policy analysis matrix (pam)*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) daya saing (keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif), (2) dampak kebijakan pemerintah terhadap output dan input, dan (3) sensitivitas daya saing pada usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Metode analisis yang digunakan adalah Nilai Sekarang Bersih (Net

Present Value) dan Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix). Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan 30 Maret 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo memiliki daya saing dengan indikator keunggulan kompetitif  $PP > 0$  dan  $PCR = 0,19$ , dan indikator keunggulan komparatif  $SP > 0$  dan  $DRCR = 0,13$ ; (2) Kebijakan pemerintah tidak protektif dan disinsentif pada output karena nilai  $NPCO = 0,67$ , kebijakan pemerintah pada input tradable bersifat protektif karena nilai  $NPCI = 0,71$ , dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan bersifat disinsentif pada komoditi kelapa sawit karena nilai  $PC = 0,61$ ,  $EPC = 0,66$ , dan  $SRP = -0,31$ ; dan (3) Usahatani kelapa sawit rakyat masih memiliki daya saing jika harga output turun 50 persen karena nilai  $PCR = 0,43$  dan  $DRCR = 0,29$ , demikian juga jika harga input naik 6,38 persen karena nilai  $PCR = 0,21$  dan  $DRCR = 0,14$ , pun demikian jika kedua simulasi berlaku sekaligus, karena nilai  $PCR = 0,46$  dan  $DRCR = 0,30$ .

kata kunci : kelapa sawit, daya saing, keunggulan kompetitif, keunggulan komparatif, policy analysis matrix (pam)

## PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peranan penting di bidang pertanian, khususnya subsektor perkebunan, karena kelapa sawit adalah komoditas penghasil minyak nabati yang paling banyak dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit memegang peranan yang cukup strategis karena mempunyai prospek cerah sebagai sumber devisa negara (Pardamean, 2008).

Pengusahaan tanaman kelapa sawit di Indonesia sebagai suatu komoditas perkebunan banyak dilakukan oleh perkebunan besar yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2013, total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah 10,4 juta Hektar, dengan persentase luas lahan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 51,42 persen, Perkebunan Besar Negara (PBN) sebesar 6,95 persen, dan Perkebunan Rakyat (PR) sebesar 41,63 persen. Meskipun PBS mendominasi luas lahan perkebunan kelapa sawit, namun persentase rata-rata laju pertumbuhan luas lahan tertinggi periode tahun 1980 – 2013 dicapai oleh PR sebesar 29,61 persen, sementara PBS dan PBN memperoleh persentase rata-rata laju pertumbuhan luas lahan masing-masing sebesar 14,25 persen dan 4,38 persen (Dirjen Perkebunan, 2014). Di Kabupaten Bungo, luas lahan perkebunan kelapa sawit didominasi oleh PR dengan persentase 69,85 persen, dan kemudian disusul oleh PBS dengan persentase 30,15 persen, dengan total luas lahan perkebunan kelapa sawit di adalah 76.124 Hektar dan produksi sebesar 168.092 Ton. Seluruh kecamatan di Kabupaten Bungo memiliki areal kelapa sawit rakyat, dengan kecamatan yang terluas dalam pengusahaannya adalah Kecamatan Pelepat yang memiliki luas lahan sebesar 17.738 Ha (Disbun Provinsi Jambi, 2015).

Dalam pengusahaan kelapa sawit, dibutuhkan modal yang cukup besar dalam membudidayakan kelapa sawit mulai dari benih sampai menjadi tanaman menghasilkan. Meskipun dalam pengusahaan tanaman kelapa sawit membutuhkan modal yang tidak sedikit, tetap saja banyak petani yang mengusahakan tanaman kelapa sawit di Kecamatan Pelepat. Selain itu, produksi kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pelepat tergolong cukup tinggi. Namun, hal tersebut belum menjamin usahatani tersebut memiliki daya saing, karena terdapat faktor harga yang mempengaruhi pendapatan usahatani kelapa sawit, yaitu harga output dan input, yang dapat mengidentifikasi daya saing usahatani tersebut, sebab daya saing itu sendiri adalah kemampuan atau kesanggupan komoditas pertanian untuk mempertahankan perolehan laba dan pangsa pasar, sehingga produsen mempunyai kemampuan dalam memproduksi komoditas pertanian sehingga dapat mempertahankan kelanjutan usahanya (Soetriono, 2006).

Harga TBS di tingkat petani pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Di lain hal, harga pupuk anorganik untuk kebutuhan kelapa sawit tergolong relatif tinggi. Tingginya harga pupuk anorganik dan melemahnya harga TBS diperkirakan akan menyulitkan petani dalam membudidayakan kelapa sawit. Permasalahan harga ini menjadi fokus utama petani, sebab harga merupakan salah satu komponen penting bagi petani untuk mengoptimalkan usahatannya dan memutuskan apakah tetap melanjutkan atau menghentikan usahatannya. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba menjawab permasalahan petani apakah usahatani kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pelepat masih layak dipertahankan dan memiliki daya saing, dan membantu pemerintah dalam memberikan gambaran terhadap dampak kebijakan yang telah diberlakukan pada komoditas kelapa sawit.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, pada tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016, dengan pertimbangan bahwa daerah penelitian merupakan daerah yang paling mendominasi luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai objek penelitian, yang mana data primernya diperoleh dari responden (petani kelapa sawit) yang berada di daerah penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait.

Penentuan jumlah responden menggunakan teknik pengambilan sampel yang dikembangkan oleh Slovin (Sugiyono, 2010). Responden penelitian berjumlah 82 orang dari total populasi yang berjumlah 460 orang petani kelapa sawit rakyat yang berasal dari dua desa di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, yaitu Desa Gapura Suci dan Desa Mulia Bakti. Untuk mendapatkan responden yang merata dari kedua desa, digunakan rumus proporsional sampling, maka didapatkan responden dari Desa Gapura Suci berjumlah 35 orang dan responden dari Desa Mulia Bakti berjumlah 47 orang.

Sebelum memasukkan data penelitian pada instrumen penelitian, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi terhadap komponen asing (tradable) dan domestik (nontradable) dan justifikasi harga sosial (harga bayangan), yang nantinya harga ini digunakan pada analisis ekonomi. Komponen tradable yaitu, output (TBS), pupuk urea dan kimia lain, dan herbisida, sementara komponen domestik yaitu, pupuk organik, upah tenaga kerja, bibit/benih, dan peralatan budidaya.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Finansial dan Ekonomi dengan menggunakan Nilai Sekarang Bersih (Net Present Value), dan dilanjutkan dengan Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix). NPV digunakan untuk mendiskonto arus kas usahatani kelapa sawit rakyat yang akan berlangsung selama 25 tahun ke depan menjadi nilai hari ini. Pada analisis finansial, harga input dan output yang digunakan adalah harga privat (harga aktual), yaitu harga yang betul-betul dibayarkan petani, sementara pada analisis ekonomi digunakan harga sosial atau harga bayangan/efisiensi (pasar sebelum intervensi pemerintah atau pasar bebas). Rumus NPV untuk analisis finansial dan ekonomi (Gittinger, 2008):

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{(B_t - C_t)}{[(1+i)]^t}$$

Keterangan:

NPV = Nilai Bersih Sekarang (Net Present Value)

i = Tingkat Bunga

t = Tahun ke- ...

Bt = Penerimaan (benefit) pada tahun t

Ct = Biaya (Cost) pada tahun t

Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix) mampu mengidentifikasi keunggulan kompetitif dan komparatif serta efisiensi ekonomi dan besarnya insentif atau dampak intervensi dalam pengusahaan berbagai aktivitas usahatani secara keseluruhan dan sistematis (Pearson dkk, 2005). Baris pertama tabel PAM adalah analisis finansial, sedangkan baris kedua tabel PAM adalah analisis ekonomi.

Tabel 1. Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Matrix*)

Uraian	Penerimaan	Biaya		Pendapatan
		<i>Input Tradable</i>	<i>Input Domestik</i>	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H

Divergensi                      I                      J                      K                      L

---

Indikator hasil analisis PAM di antaranya, yaitu:

1. Keunggulan Kompetitif

- a) Profitabilitas Privat (*Private Profitability*) adalah  $D = A - (B + C)$ . Jika  $PP > 0$ , berarti usahatani layak investasi dan memiliki keunggulan kompetitif; Jika  $PP \leq 0$ , berlaku sebaliknya
- b) Rasio Biaya Privat (*Private Cost Ratio*) adalah  $PCR = \frac{C}{A-B}$ . Jika  $PCR < 1$ , berarti usahatani memiliki keunggulan kompetitif; Jika  $PCR \geq 1$ , berlaku sebaliknya

2. Keunggulan Komparatif

- a) Profitabilitas Sosial (*Social Profitability*) adalah  $H = E - (F + G)$ . Jika  $SP > 0$ , berarti usahatani layak investasi dan memiliki keunggulan komparatif; Jika  $SP \leq 0$ , berlaku sebaliknya
- b) Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (*Domestic Resource Cost Ratio*) adalah  $DRCR = \frac{G}{E-F}$ . Jika  $DRCR < 1$ , berarti usahatani memiliki keunggulan komparatif; Jika  $DRCR \geq 1$ , berlaku sebaliknya

3. Dampak Kebijakan Pemerintah (Divergensi)

- a) Transfer Output (*Output Transfer*) adalah  $I = A - E$ . Jika  $OT > 0$ , berarti terdapat surplus produsen; Jika  $OT \leq 0$ , berlaku sebaliknya
- b) Koefisien Proteksi Nominal pada Output (*Nominal Protection Coefficient on Output*) adalah  $NPCO = \frac{A}{E}$ . Jika  $NPCO > 1$ , berarti kebijakan bersifat protektif terhadap output; Jika  $NPCO \leq 1$ , berlaku sebaliknya
- c) Transfer Input (*Input Transfer*) adalah  $J = B - F$ . Jika  $IT < 0$ , berarti kebijakan bersifat protektif pada *input tradable*; Jika  $IT \geq 0$ , berlaku sebaliknya
- d) Koefisien Proteksi Nominal pada Input (*Nominal Protection Coefficient on Tradable Input*) adalah  $NPCI = \frac{B}{F}$ . Jika  $NPCI < 1$ , berarti kebijakan bersifat protektif terhadap *input tradable*; Jika  $NPCI \geq 1$ , berlaku sebaliknya
- e) Faktor Transfer (*Transfer Factor*) adalah  $K = C - G$ . Jika  $TF > 0$ , berarti terdapat transfer dari petani ke produsen *input domestik*; Jika  $TF \leq 0$ , berlaku sebaliknya
- f) Transfer Bersih (*Net Policy Transfer*) adalah  $L = D - H$ . Jika  $NPT > 0$ , berarti terdapat tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada *input dan output*. Jika  $NPT \leq 0$ , berlaku sebaliknya
- g) Koefisien Proteksi Efektif (*Effective Protection Coefficient*) adalah  $EPC = \frac{A-B}{E-F}$ . Jika  $EPC > 1$ , kebijakan bersifat protektif terhadap komoditas; Jika  $EPC \leq 1$ , berlaku sebaliknya
- h) Koefisien Profitabilitas (*Profitability Coefficient*) adalah  $PC = \frac{D}{H}$ . Jika  $PC > 0$ , berarti secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen; Jika  $PC \leq 0$ , berlaku sebaliknya
- i) Rasio Subsidi pada Produsen (*Subsidy Ratio to Producer*) adalah  $SRP = \frac{L}{E}$ . Jika  $SRP < 0$ , berarti kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya imbalan untuk berproduksi; Jika  $SRP \geq 0$ , berlaku sebaliknya

Selain kedua analisis di atas, dilakukan juga Analisis Sensitivitas, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengubah-ubah nilai *input* dan *output* untuk melihat pengaruhnya terhadap daya saing usahatani komoditas kelapa sawit rakyat di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo. Skenarionya yaitu, jika harga *output* turun 50 persen (*ceteris paribus*), jika harga *input* naik 6,38 persen (*ceteris paribus*), dan jika kedua simulasi tersebut digabungkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Justifikasi Harga Sosial (Harga Bayangan)

1. Harga Sosial Nilai Tukar, yaitu harga uang domestik dalam kaitannya dengan mata uang asing yang terjadi pada pasar nilai uang pada kondisi bersaing sempurna. Menurut Van Der Tak (1969) dalam Gittinger (2008), keseimbangan nilai tukar uang didekati dengan menggunakan *Standar Conversion Factor (SCF)*, sehingga didapatkan nilai tukar sosial adalah Rp13.478,65/US\$.
2. Harga Sosial *Output* (TBS) didekati dengan harga border, yaitu FOB karena CPO adalah produk turunan dari TBS dan Indonesia adalah eksportir CPO. Rata-rata harga CPO pada tahun 2015 adalah US \$622,67/Ton, sehingga harga sosial TBS adalah Rp1.764,30/KG.
3. Harga Sosial Pupuk Kimia didekati dengan harga border. Harga sosial pupuk urea adalah Rp3.911,56/KG, yang didekati dengan harga FOB, sebab Indonesia merupakan eksportir pupuk urea. Sedangkan harga sosial pupuk NPK dan Dolomite, adalah masing-masing Rp5.320,48/KG dan Rp2.012,31/KG, yang didekati dengan harga CIF, sebab mayoritas bahan baku NPK dan Dolomite merupakan produk impor.
4. Harga Sosial Obat-obatan adalah sama dengan harga aktualnya, yaitu Rp68.000/L, sebab komponen ini diperdagangkan dalam di dalam negeri dan pengadaannya tidak membutuhkan subsidi (Soetriono, 2006).
5. Harga Sosial Tenaga Kerja pada penelitian ini adalah tingkat upah tenaga kerja tak terlatih. Namun ketentuan umum mengenai pendugaan harga bayangan tenaga kerja tak terlatih belum ada di negara berkembang, maka estimasi harga sosial upah tenaga kerja adalah sama dengan harga aktualnya (Soetriono, 2006).
6. Harga Sosial Lahan adalah sama dengan harga aktual pembelian lahan, yaitu Rp7.086.538,46/Ha.
7. Harga Sosial Alat-Alat Pertanian adalah sama dengan harga aktualnya karena komponen-komponen tersebut diperdagangkan dalam negeri dan mudah didapatkan di lokasi penelitian.
8. Harga Sosial Bunga Modal adalah sama dengan harga aktualnya, yaitu 5,52 persen, sebab bunga modal merupakan pemindahan uang dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Meskipun bagi petani pada dasarnya sebagai pengeluaran, namun hasil dari pengeluaran tersebut tidak dirasakan secara riil mengingat pengeluaran tersebut akan dirasakan masyarakat umum, karena dalam analisis ekonomi, pajak, pungutan, dan bunga modal

tidak diperhitungkan walaupun dalam analisis finansial merupakan pengeluaran (Soetrisno, 2006).

### **Matriks Analisis Kebijakan (*Policy Aanalysis Matrix*)**

PAM digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya daya saing dan dampak divergensi dari usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian. Hasil analisis PAM pada usahatani kelapa sawit rakyat dijabarkan selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2. PAM Usahatani Kelapa Sawit Rakyat Per Hektar di Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Tahun 2015

Uraian	Penerimaan (Rp/Ha)	Biaya (Rp/Ha)		Pendapatan (Rp/Ha)
		Input <i>Tradable</i>	Input Domestik	
Harga Privat	225.498.852,92	21.274.072,85	39.773.203,76	164.451.576,31
Harga Sosial	337.892.059,22	29.784.166,67	39.773.203,76	268.334.688,79
Divergensi	(112.393.206,30)	(8.510.093,82)	0,00	(103.883.112,48)

Sumber: *Data primer diolah, 2016*

### **Daya Saing (Keunggulan Kompetitif dan Komparatif)**

Usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian memiliki keunggulan kompetitif, karena nilai PP besar dari nol, dan rasio PCR kurang dari satu. PP menunjukkan nilai Rp164.451.576,31/Ha ( $PP > 0$ ), yang berarti bahwa usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian layak dilanjutkan, bahkan layak diekspansi karena memiliki keuntungan setiap satu hektar lahannya. Dengan rata-rata harga TBS yang diterima petani sebesar Rp1.177,44/KG, petani mendapatkan keuntungan Rp164.451.576,31/Ha.

PCR merupakan rasio antara biaya faktor domestik dengan nilai tambah *output* dari biaya faktor domestik yang diperdagangkan pada harga privat (terdapat kebijakan pemerintah). Efisiensi finansial dicapai jika rasio PCR lebih kecil daripada satu, karena untuk meningkatkan nilai tambah satu satuan diharapkan tambahan biaya faktor domestik lebih kecil daripada satu. Untuk memperkecil rasio PCR dilakukan dengan cara meminimumkan biaya faktor domestik atau memaksimalkan nilai tambah sehingga keuntungan yang diperoleh dapat mencapai maksimum. Usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian dikatakan memiliki keunggulan kompetitif karena rasio biaya privat (PCR) menunjukkan rasio 0,19 ( $PCR < 1$ ), yang berarti untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah (Rp13.384,81 atau US \$1) pada harga privat, diperlukan korbanan biaya input domestik sebesar 19 persen dari nilai tambah tersebut, yaitu Rp2.543,11. Semakin kecil nilai PCR, semakin tinggi keunggulan kompetitifnya. Hal ini juga berarti bahwa dengan adanya campur tangan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang menyangkut subsidi pupuk, sarana produksi dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berkaitan dengan kelapa sawit, telah menguntungkan petani.

Usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian juga memiliki keunggulan komparatif, karena nilai SP besar dari nol, dan rasio DRCR kurang dari satu. SP menunjukkan nilai Rp268.334.688,79/Ha ( $SP > 0$ ), yang berarti bahwa usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian layak dilanjutkan karena memiliki keuntungan sosial setiap satu hektar lahannya. Dengan rata-rata harga sosial TBS (harga tanpa intervensi pemerintah), yaitu Rp1.764,30/KG, petani bisa mendapatkan keuntungan sosial besar Rp268.334.688,79/Ha.

### **Dampak Kebijakan Pemerintah (Divergensi)**

#### **Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Output**

Campur tangan pemerintah pada harga output dapat dilihat dari Transfer *Output* (*Output Transfer, OT*), yaitu untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu memberikan insentif ekonomi terhadap pelaku ekonomi, sedangkan rasio *Nominal Protection Coefficient Output* (NPCO) digunakan untuk melihat seberapa besar campur tangan pemerintah tersebut. OT menunjukkan besarnya perbedaan penerimaan usahatani yang benar-benar diterima petani dengan penerimaan usahatani pada harga ekonomi. Nilai positif dari OT menunjukkan besarnya insentif masyarakat atau konsumen terhadap produsen dan pedagang. Dengan kata lain, masyarakat membeli dan produsen menerima dengan harga lebih tinggi daripada harga yang harus dibayar.

Transfer *Output* menunjukkan hasil negatif ( $OT = \text{Rp } -112.393.206,30$ ), artinya bahwa harga TBS di pasar domestik (Rp1.177,44/KG) lebih rendah dibandingkan harga efisiensinya (Rp1.764,30/KG). Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan pajak atau pungutan terhadap output yang dibebankan kepada petani produsen secara tidak langsung. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan terhadap harga *output* bersifat disinsentif dan tidak adanya surplus produsen. Hasil OT didukung pula oleh rasio NPCO, yaitu sebesar 0,67, yang berarti bahwa petani menerima harga *output* lebih rendah 33 persen dari harga efisiensinya (harga internasional). Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan harga *output* menyebabkan harga aktual TBS lebih kecil daripada harga internasional.

#### **Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input**

Campur tangan pemerintah pada harga *input tradable* dapat dilihat dari Transfer Input (*Input Transfer, IT*) dan rasio *Nominal Protection Coefficient Input* (NPCI). IT menunjukkan besarnya perbedaan antara biaya *input tradable* pada harga aktual dan biaya *input tradable* pada harga ekonomi. NPCI merupakan rasio harga privat *input tradable* dan harga ekonominya. Untuk melihat perbedaan harga aktual dan sosial pada *input* domestik, digunakan indikator Transfer Faktor (*Factor Transfer, FT*), apabila FT bernilai positif, berarti biaya *input* domestik dibayar dengan harga yang lebih mahal daripada harga internasional.

IT menunjukkan hasil negatif ( $IT = \text{Rp } -8.510.093,82$ ), yang berarti bahwa terdapat subsidi pemerintah terhadap *input tradable*, sehingga petani tidak membayar penuh untuk membeli *input tradable*. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah bersifat protektif terhadap



*input tradable*, sehingga petani dapat membeli *input* dengan harga yang lebih murah. Rasio NPCI sebesar 0,71, yang berarti bahwa petani membeli *input tradable* dengan harga lebih murah 29 persen dari harga seharusnya karena adanya insentif pemerintah berupa subsidi terhadap *input tradable* tersebut. Di lain hal, FT menunjukkan hasil nol ( $FT = \text{Rp } 0,00$ ) yang menandakan bahwa tidak adanya subsidi terhadap *input* domestik, sebab harga aktual dan ekonomi *input* domestik adalah sama, karena harga aktual *input* domestik sudah mencerminkan harga ekonomi *input* domestik.

### **Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap *Input-Output***

Dampak kebijakan pemerintah secara keseluruhan terhadap komoditas kelapa sawit, baik terhadap *input* maupun *output* dapat dilihat dari Transfer Bersih (*Net Policy Transfer, NPT*), Koefisien Profitabilitas (*Profitability Coefficient, PC*), Koefisien Proteksi Efektif (*Effective Protection Coefficient, EPC*), dan Rasio Subsidi pada Produsen (*Subsidy Ratio to Producer, SRP*).

Transfer Bersih (NPT) merupakan selisih antara keuntungan privat dan keuntungan sosial yang menggambarkan dampak kebijakan pemerintah terhadap penerimaan apakah menguntungkan atau merugikan. Nilai NPT yang diperoleh bernilai negatif, yaitu Rp – 103.883.112,48 ( $NPT < 0$ ), menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak menghasilkan surplus produsen. Keuntungan yang diperoleh ketika ada kebijakan pemerintah lebih rendah sebesar Rp103.883.112,48 dibandingkan dengan tidak adanya campur tangan pemerintah. Pengaruh kebijakan secara keseluruhan dicerminkan oleh Koefisien Profitabilitas (PC) yang menyebabkan keuntungan privat berbeda dengan keuntungan sosial yang diperoleh dari rasio penerimaan privat dengan sosial. Nilai PC yang diperoleh 0,61 ( $PC > 0$ ) yang berarti bahwa kebijakan pemerintah memberikan insentif pada petani, namun keuntungan yang diperoleh petani kelapa sawit hanya 61 persen dari yang semestinya.

Untuk melihat kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan daya saing guna mendorong kegiatan usahatani kelapa sawit dapat digunakan Koefisien Proteksi Efektif (EPC), yaitu indikator yang memberikan nilai tambah terhadap komoditas kelapa sawit. Bila EPC bernilai lebih kecil atau sama dengan satu, berarti insentif pemerintah tidak efektif atau tidak ada insentif pemerintah sama sekali. Rasio EPC adalah sebesar 0,66 ( $EPC \leq 1$ ), yang berarti bahwa kebijakan yang terhadap output maupun subsidi input bersifat menghambat (tidak efektif) terhadap petani untuk berproduksi. Semakin tinggi nilai EPC ( $EPC > 1$ ), semakin tinggi pula proteksi pemerintah terhadap komoditas domestik.

Rasio Subsidi pada Produsen (SRP) merupakan rasio antara transfer bersih dengan penerimaan sosial. SRP memberikan indikasi tentang seberapa besar kebijakan pemerintah meningkatkan/mengurangi biaya produksi. Jika nilai SRP negatif ( $SRP < 0$ ), berarti kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya sosial untuk berproduksi. Nilai SRP yang diperoleh adalah -0,31, yang berarti bahwa kebijakan pemerintah yang ada pada *input* produksi telah menaikkan biaya produksi, sehingga produsen menanggung biaya produksi lebih besar 31 persen dari biaya sesungguhnya.

### **Analisis Sensitivitas**

Analisis sensitivitas dilakukan dengan tiga simulasi, yaitu: (1) Jika harga TBS turun 50 persen (*ceteris paribus*), sebab selama tahun 2015 penurunan harga TBS sangat signifikan dan diperkirakan masih akan turun, persentase penurunannya juga sangat mengkhawatirkan, yaitu 58—75 persen di berbagai daerah; (2) Jika harga *input* naik 6,38 persen (*ceteris paribus*), karena angka tersebut merupakan inflasi pada tahun 2015, yang dikhawatirkan inflasi tersebut cukup memengaruhi kenaikan harga *input* yang bersifat variabel, seperti pupuk organik dan kimia, herbisida, tenaga kerja, dan alat-alat pertanian; dan (3) Jika harga TBS turun 50 persen dan harga *input* naik 6,38 persen. Hasil ketiga simulasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Analisis Simulasi Daya Saing dan Divergensi Pada Usahatani Kelapa Sawit Rakyat Per Hektar di Kec. Pelepat Kab. Bungo Tahun 2015

Kondisi	PCR	DRCR	NPCO	NPCI	EPC	PC	SRP
Normal	0,19	0,13	0,67	0,71	0,66	0,61	-0,31
Harga TBS Turun 50%	0,43	0,29	0,67	0,71	0,66	0,52	-0,28
Harga Input Naik 6,38%	0,21	0,14	0,67	0,71	0,66	0,61	-0,31
Harga TBS Turun 50% dan Harga Input Naik 6,38%	0,46	0,30	0,67	0,71	0,66	0,51	-0,28

Sumber: Data primer diolah, 2016

Jika harga TBS turun 50 persen, usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian masih memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, tetapi rasio keunggulannya berkurang. Rasio biaya privat (PCR) sebesar 0,43, yang berarti untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah (Rp13.384,81 atau US \$1) pada harga privat, diperlukan korbanan biaya input domestik sebesar 43 persen dari nilai tambah tersebut, yaitu Rp5.755,46. Sementara itu, rasio antara biaya sumberdaya domestik atas nilai tambah sosialnya (DRCR) sebesar 0,29, yang berarti untuk menghemat satu satuan devisa (Rp13.478,65 atau US \$1) dibutuhkan sumber daya domestik sebesar 29 persen dari satu satuan devisa tersebut, yaitu Rp3.908,81. Nilai PC yang diperoleh turun menjadi 0,52 ( $PC > 0$ ) yang berarti bahwa kebijakan pemerintah memberikan insentif pada petani, namun keuntungan yang diperoleh petani kelapa sawit hanya 52 persen dari yang semestinya. Sementara itu, nilai SRP juga negatif ( $SRP < 0$ ), berarti kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih besar dari biaya sosial untuk berproduksi. Nilai SRP yang diperoleh adalah -0,28, yang berarti bahwa kebijakan pemerintah yang ada pada input produksi telah menaikkan biaya produksi, sehingga produsen menanggung biaya produksi lebih besar 28 persen dari biaya sesungguhnya.

Jika harga *input* variabel naik 6,38 persen, usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian juga masih memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, tetapi rasio keunggulannya berkurang. Rasio PCR yang diperoleh sebesar 0,21, yang berarti untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah (Rp13.384,81 atau US \$1) pada harga privat, diperlukan korbanan biaya *input* domestik sebesar 21 persen dari nilai tambah tersebut, yaitu Rp2.810,81. Sementara itu, rasio DRCR sebesar 0,14, yang berarti untuk menghemat satu satuan devisa (Rp13.478,65 atau US \$1) dibutuhkan sumber daya domestik sebesar 14 persen

dari satu satuan devisa tersebut, yaitu Rp1.887,01. Nilai PC dan SRP yang diperoleh sama dengan nilai sebelum harga *input* naik, yaitu 0,61 dan -0,31, yang artinya keuntungan petani kelapa sawit hanya 61 persen dari yang semestinya dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kelapa sawit mengakibatkan petani mengeluarkan biaya produksi lebih besar 31 persen dari biaya sosial untuk berproduksi.

## SIMPULAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis PAM, usahatani kelapa sawit rakyat di daerah penelitian memiliki daya saing (keunggulan kompetitif dan komparatif). Dikatakan memiliki keunggulan kompetitif karena Profitabilitas Privat (PP) memiliki nilai Rp164.451.576,31/Ha ( $PP > 0$ ) dan rasio sumberdaya domestik pada harga privat (PCR) bernilai 0,19 ( $PCR < 1$ ). Selain itu, dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena Profitabilitas Sosial (SP) memiliki nilai Rp268.334.688,79/Ha ( $SP > 0$ ) dan rasio sumberdaya domestik pada harga sosial (DRCR) bernilai 0,13 ( $DRCR < 1$ ).

Transfer Output (OT) bernilai negatif ( $OT = \text{Rp} -112.393.206,30$ ) dan rasio Koefisien Proteksi Nominal pada Output (NPCO) bernilai 0,67 ( $NPCO < 1$ ) yang berarti bahwa kebijakan pemerintah tidak protektif pada output. Di sisi lain, Transfer Input (IT) bernilai negatif ( $IT = \text{Rp} -8.510.093,82$ ) dan rasio Koefisien Proteksi Nominal pada Input (NPCI) bernilai 0,71 ( $NPCI < 1$ ) yang berarti bahwa kebijakan pemerintah bersifat protektif pada input tradable. Transfer Bersih (NPT) yang diperoleh bernilai negatif, yaitu Rp -103.883.112,48 ( $NPT < 0$ ), menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak menghasilkan surplus produsen, namun masih memberikan insentif pada petani karena Koefisien Profitabilitas (PC) yang diperoleh 0,61 ( $PC > 0$ ). Rasio Koefisien Proteksi Efektif (EPC) sebesar 0,66 ( $EPC \leq 1$ ), yang berarti bahwa kebijakan terhadap output maupun input bersifat menghambat (tidak efektif) terhadap petani untuk berproduksi. Rasio Subsidi pada Produsen (SRP) yang diperoleh adalah -0,31, yang berarti bahwa kebijakan pemerintah yang ada pada input produksi telah menaikkan biaya produksi, sehingga produsen menanggung biaya produksi lebih besar 31 persen dari biaya sesungguhnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perkebunan Provinsi Jambi. 2105. Statistik Pekebunan Provinsi Jambi Tahun 2014. Jambi.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2014. Statistik Perkebunan Indonesia 2013. Jakarta: Kementrian Pertanian.

- Gittinger, J. Price. 2008. Analisa Ekonomi Proyek-Proyek Pertanian. Edisi Kedua. Dialihbahasakan oleh Slamet Sutomo dan Komet Mangiri. Jakarta: UI-Press.
- Pearson, S., Carl Gotsch, dan Sjaiful Bahri. 2005. Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia. Ed. 1. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soetriono. 2006. Daya Saing Pertanian dalam Tinjauan Analisis. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tribun Pekanbaru. 2015. Harga Sawit Anjlok Jadi Rp300/Kg di Tingkat Petani. Diakses 25 Agustus 2015. <http://www.pekanbaru.tribunnews.com/2015/08/19/harga-sawit-anjlok-jadi-rp-300-per-kg-di-tingkat-petani>